

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kinerja dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tugas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah merancang sebuah undang-undang. Dalam melaksanakan pengetahuan perundang-undangan agar tidak tercipta peraturan yang tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya. Dalam praktiknya tidak diatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memiliki pengetahuan mengenai legislasi

Kata kunci : Profesionalitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi Legislasi, UU. MD 3.

ABSTRACT

People's Representative Council. The presence of members of the People's Legislative Assembly in carrying out the legislative functions issued in Law Number 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly, the Regional Representative Council, the Regional People's Representative Council. The research method used in this study is normative juridical by using secondary data sources as a matrimony of thought, then the data is analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the study, this is the task of the House of Representatives which determines a law. In requests for knowledge, invitations do not create rules that overlap with other regulations. In its regulations it is not necessary that candidates for the House of Representatives must have knowledge of legislation

Keywords: Professionalism of Members of the People's Legislative Assembly, Legislation Function, Law. MD 3.